



FGD TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PERMASALAHANNYA

M Zeet Akui Pengelolaan Keuangan Masih Lemah

PONTIANAK-RK. Pemprov Kalbar telah berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mengingat laporan keuangan Pemprov Kalbar masih dalam proses penyelesaian yang diajukan ke status IV (empat) atau temuan yang tidak dapat di tindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Sekda Kalbar M. Zeet Hamdy Assovie tak memungkiri bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan. Termasuk pengelolaan aset. Harapannya agar BPK RI perwakilan Kalbar tidak bosan melakukan pembinaan terhadap Pemda. Baik melalui konsultasi maupun saran dan rekomendasi. "Kami terus berharap koordinasi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus dibina agar lebih baik lagi," harapnya ketika membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Permasalahannya, Kamis (12/10) di Aston Hotel Pontianak.

Pada FGD yang dibuka Anggota VI BPK RI Hary Azis itu M Zeet mengajak stakeholder terkait, pemerintah kabupaten/kota serta BPK untuk selalu bekerja sama guna meningkatkan, memperbaiki dan menata administrasi pemerintahan. Supaya tercapainya pemerintahan yang

bersih dan akuntabel. "Di dalam Pasal 23 UUD 1945 sudah menyatakan dengan jelas bahwa pengelolaan keuangan negara harus bersifat terbuka, bertanggungjawab dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," paparnya.

Sejalan dengan hal itu, BPK RI sebagai lembaga yang diberi kewenangan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Sehingga rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berupa pembinaan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan harus segera di tindak lanjuti. Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHP dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. "FGD Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Permasalahannya ini sangat penting. Karena bertujuan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan sebagai wadah klarifikasi solusi permasalahan yang dihadapi," tutur Sekda.

Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi



PUKUL GONG. M. Zeet Hamdy Assovie mendampingi Anggota VI BPK RI Hary Azis memukul gong tanda dimulainya FGD Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Permasalahannya, Kamis (12/10). **HUMAS PEMPROV FOR RK**